

ALTERNATIF UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MEKANISME *VICTIM TRUST FUND*

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi tantangan besar bagi negara untuk dapat memberikan perlindungan serta pemulihan kepada korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alternatif dari upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual melalui mekanisme *victim trust fund*. Permasalahannya adalah apakah proses restitusi yang ada telah efektif dilakukan dan apakah regulasi yang mengatur terkait *victim trust fund* dapat menjadi pembaruan hukum yang dapat memenuhi hak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban kekerasan seksual melalui proses restitusi belum terlaksana dengan baik, sehingga proses pemulihan korban menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan pembayaran restitusi menghadapi berbagai kendala, antara lain mekanisme regulasi yang belum komprehensif, prosedur pengajuan yang rumit, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, banyak pelaku tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi sehingga putusan sulit dieksekusi. Ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif, minimnya pendampingan bagi korban, serta tidak adanya dana talangan dari negara juga membuat korban sering tidak memperoleh haknya secara penuh. Adapun peraturan pemerintah terkait dana bantuan korban yang akhirnya disahkan ternyata tidak menjawab permasalahan terkait kepastian pembayaran restitusi melalui kompensasi serta tidak adanya mekanisme lebih lanjut terkait sumber pendanaan *victim trust fund* tersebut. Akhirnya, permasalahan terkait restitusi tersebut belum menemukan jawaban dan masih menyisakan tanda tanya. Karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai pemenuhan pembayaran restitusi, disertai kerangka kebijakan jangka panjang agar peraturan perundang-undangan terkait tidak disusun secara tergesa-gesa. Dengan demikian, negara dapat mendorong reformasi sistem hukum nasional yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Hak Korban, Restitusi, Dana Bantuan Korban

ALTERNATIVE EFFORTS TO FULFILL THE RIGHTS OF SEXUAL VIOLENCE VICTIMS THROUGH THE VICTIM TRUST FUND MECHANISM

ABSTRACT

The prevalence of sexual violence cases in Indonesia poses a major challenge for the state in providing protection and recovery to victims. The purpose of this study is to identify alternatives for fulfilling the rights of victims of sexual violence through the victim trust fund mechanism. The issues are whether the existing restitution process has been effective and whether the regulations governing the victim trust fund can serve as a legal reform that fulfills the rights of victims of sexual violence. The research method used is normative legal research with a legislative and comparative approach. The results show that the fulfillment of the rights of victims of sexual violence through the restitution process has not been carried out properly, thereby hindering the recovery process for victims. This is because restitution payments face various obstacles, including an incomplete regulatory mechanism, complicated application procedures, and weak coordination between law enforcement agencies. In addition, many perpetrators are unable or unwilling to pay restitution, making it difficult to enforce the verdict. The absence of effective enforcement mechanisms, minimal assistance for victims, and the lack of bailout funds from the state also mean that victims often do not receive their full rights. The government regulation on victim assistance funds that was finally passed did not address the issue of certainty of restitution payments through compensation, nor did it provide a further mechanism regarding the source of funding for the victim trust fund. Ultimately, the issue of restitution remains unresolved and questions remain. Therefore, clear legislation on the fulfillment of restitution payments is needed, accompanied by a long-term policy framework so that related legislation is not drafted hastily. In this way, the state can promote a reform of the national legal system that favors victims and upholds the value of justice.

Keywords: *Sexual Violence, Victims' Rights, Restitution, Victim Trust Fund*